

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sumber daya hutan sebagai salah satu kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap menjaga kelestariannya untuk kesejahteraan rakyat dengan cara tetap menjaga keberlangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungannya (Jazuli, 2012). Hutan mempunyai fungsi yang sangat penting di antaranya adalah untuk pengatur tata air, pencegahan erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah (Trianggana, 2012). Selain itu, bagi masyarakat sekitar hutan selain memberikan manfaat jasa lingkungan, hutan juga memberikan manfaat berupa kayu yang bernilai ekonomis (Agustini *et al.*, 2017). Dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya kearah tersebut, diantaranya adalah menciptakan Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (PP No. 23 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Program Perhutanan Sosial juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dalam aspek keadilan, mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menyelesaikan konflik tenurial, meningkatkan ketahanan pangan dan iklim, serta mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Supriyanto, 2019 *dalam* Ekawati *et al.*, 2020). Dari hal tersebut kemudian muncul sebuah kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat yang salah satunya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, adalah bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang dapat berperan dalam upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan produktivitas lahan-lahan

yang terdegradasi, peningkatan produksi kayu bakar, produksi kayu bahan bangunan dan bahan baku industri, serta percepatan usaha rehabilitasi lahan (Ekawati *et al.*, 2020). Masyarakat yang awalnya mengelolakan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum mengelola namun ingin turut berpartisipasi, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Sepsiaji &Fuadi 2004) dalam (Dewi *et al.*, 2018). Lahan andil merupakan lahan garapan petani di hutan negara.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Prinsip pembangunan kehutanan yang diterapkan dalam kebijakan HTR adalah usaha hutan tanaman dengan pola serupa HTI (Hutan Tanaman Industri) namun dalam skala yang lebih kecil (Tuti Herawati, 2011). Program HTR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan yang terdegradasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Herawati *et al.*, 2010). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 dijelaskan bahwa pembangunan HTR menggunakan komposisi tanaman kayu 70% dan tanaman tahunan 30% sehingga sesuai dengan tujuan HTR yaitu agar tetap terjaga kelestarian kawasan hutan dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Salah satu HTR di Provinsi Jambi yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat yaitu KPHP Unit II dan Unit III Bungo yang diberikan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5689/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2019 tanggal 18 Juni tahun 2019 dengan luas 524 ha yaitu Gapoktan Apung Mandiri yang terletak di Dusun Karak Apung, Kecamatan Bathin III Ulu, Bungo. Pola tanaman yang digunakan adalah kombinasi tanaman pertanian, kehutanan dan

peternakan dengan didominasi tanaman pertanian yaitu karet. Pola tanaman ini belum mengarah pada penerapan pola tanaman HTR yang seharusnya. Hal ini karena petani jauh lebih dulu melakukan budidaya pertanian. Menurut petani, sektor budidaya jenis tanaman pertanian lebih menguntungkan dari pada jenis tanaman kehutanan dan petani mendapatkan keuntungan lebih cepat dari budidaya pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani, pendapatan dan kontribusi HTR serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Informasi mengenai karakteristik petani terbagi menjadi karakter demografi, karakter sosial ekonomi maupun karakter sosial budaya (Agunggunanto 2011) *dalam* (Dewi *et al.*, 2018). Karakteristik demografi terbagi menjadi umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga (Afandi 2010) *dalam* (Dewi *et al.*, 2018), karakteristik sosial ekonomi antara lain adalah luas lahan garapan (Suratiyah, 2001) dan pendapatan, sedangkan karakteristik sosial budaya terdiri dari mata pencaharian petani (Mubyarto 1979; Saadah 1990) *dalam* (Dewi *et al.*, 2018) dan kelembagaan (Sanudin *et al.*, 2016). Informasi mengenai karakteristik petani dapat memberikan keterangan kondisi petani dan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan. Penjelasan mengenai pendapatan dan kontribusi HTR dapat memberikan informasi mengenai berbagai permasalahan yang dialami petani. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menganalisis apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan HTR Gapoktan Apung Mandiri ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui besarnya kontribusi HTR dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Hutan Tanaman Rakyat Terhadap Pendapatan Petani Di KPHP Unit II Kabupaten Bungo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik petani HTR?
2. Berapa besar kontribusi HTR terhadap pendapatan petani?

3. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani HTR?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik petani HTR.
2. Menganalisis kontribusi HTR terhadap pendapatan petani yang mengelola lahan di KPHP unit II Kabupaten Bungo.
3. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani HTR.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi bagi para petani mengenai pendapatan yang diterima dari pengelolaan HTR, agar petani mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan.
2. Sebagai pertimbangan bagi pengelola KPHP unit II dan Kabupaten Bungo untuk pengembangan HTR.
3. Memberikan referensi bagi peneliti lain agar melakukan penelitian tentang kontribusi pendapatan HTR terhadap pendapatan petani.